

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA



**KOMPILASI KLIPING MEDIA CETAK
KEMENTERIAN PERTANIAN**

24 MEI 2024

BIRO HUMAS & INFORMASI PUBLIK

Tittle	Pengawasan Hewan Ternak	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	6	
Author	Antara/Sutarmi	

» Pengawasan Hewan Ternak



ANTARA/SUTARMI

» Aktivitas peternak dan pedagang di Pasar Hewan Siono Harjo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Rabu (22/5). Seiring kenaikan permintaan, Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Playen, Kabupaten Gunungkidul mengawasi lalu lintas hewan ternak di Pasar Hewan Siono Harjo untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular hewan ternak menjelang Idul Adha 2024.

Title	RI Bahas Larangan Ekspor Produk Kelapa dengan Rusia	
Date	24 Mei 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	12	
Author	YK/N-3	

Hubungan Bilateral

RI Bahas Larangan Ekspor Produk Kelapa dengan Russia

JAKARTA – Deputi bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Edi Prio Pamudji, bertemu dengan Deputi Menteri Pembangunan Ekonomi Russia, Dmitry Volvach, untuk membahas larangan ekspor produk kelapa asal Indonesia ke Russia.

“Indonesia menyangkan keputusan pelarangan sementara ekspor produk kelapa Indonesia oleh Russia,” ucap Edi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/5).

Seperti dikutip dari *Antara*, Edi mengatakan pemerintah Indonesia pun telah melakukan sejumlah langkah perbaikan dan meminta Russia untuk mencabut larangan ekspor itu.

Menurutnya, produk minyak kelapa sawit (*palm oil*) Indonesia telah memiliki standar yang tinggi sesuai dengan standar internasional.

Selain pelarangan ekspor produk kelapa, kedua negara juga membahas menge-

nai registrasi beberapa Unit Pengolahan Ikan (UPI) Indonesia yang akan masuk ke pasar Russia. “Kami meminta pemerintah Russia bisa memfasilitasi percepatan proses registrasi tersebut,” ujar Edi.

Kerja Sama

Dia menyampaikan peningkatan kerja sama di sektor pariwisata, rencana kerja sama di bidang halal pada sektor teknologi, infrastruktur, dan investasi, serta percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA) juga dibahas oleh kedua belah pihak pada kesempatan tersebut.

“Perjanjian perdagangan dengan EAEU sangat penting bagi kedua pihak untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan,” katanya.

Edi berharap perjanjian itu dapat memberikan manfaat kepada para pelaku usaha di Indonesia. Ia mengatakan pembentukan perjanjian itu

akan menjadi rujukan untuk meningkatkan standar produk dan komoditas ekspor Indonesia maupun negara anggota EAEU.

Sementara itu, Dmitry Volvach menyampaikan pihaknya berharap pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan usulan ekspor produk daging asal Russia yang telah disesuaikan berdasarkan sertifikasi halal. “Kami juga mengusulkan kepada Indonesia untuk mendiskusikan pembentukan sebuah pengaturan standarisasi bersama secara bilateral untuk produk farmasi,” ujarnya.

Selain itu, kedua pihak juga sepakat untuk melanjutkan koordinasi terkait jadwal pelaksanaan Pertemuan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-13 Indonesia-Russia bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, dan Teknik serta Pertemuan ke-6 Working Group on Trade, Investment, and Industry (WGTII) Indonesia-Russia. ■ YK/N-3



ANTARA/HO-KEMENKO PEREKONOMIAN

Delegasi Indonesia dan Russia bertemu pada sela-sela acara Russia Halal Expo 2024 di Kazan, Russia, Rabu (22/5).

Title	RI Perlu Belajar dari Peternakan Swedia	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Koran Jakarta	
Page	6	
Author	Ers/E-10	

Pengurangan Impor RI Perlu Belajar dari Peternakan Swedia

JAKARTA - Indonesia harus belajar dari sistem pengembangan peternakan dari Swedia agar mengurangi kebergantungan pada impor pangan. Peningkatan *breeding* dengan indukan kualitas terbaik menjadi salah satu opsi menggenjot produksi ternak nasional.

Cara ini dipandang efektif meredam impor. Sebab, proyeksi neraca pangan nasional pada 2024 yang disusun Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada komoditas daging sapi dan kerbau, kebutuhan konsumsi nasional mencapai 819 ribu ton. Sementara perkiraan produksi dalam negeri masih di angka 459 ribu ton, sehingga masih diperlukan tambahan pasokan dari pengadaan negara mitra.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menyampaikan perlu dilakukan beberapa langkah strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas peternakan di Indonesia.

"Kita pahami produksi daging sapi dan kerbau yang bersumber dari peternakan dalam negeri, masih belum mencukupi memenuhi kebutuhan konsumsi nasional setahun. Untuk itu, peternakan Tanah Air harus kita dorong dan dukung, dapat berupa dengan peningkatan *breeding* dengan indukan kualitas terbaik dan bekerjasama untuk *transfer of knowledge* dan teknologi misalnya dengan peternakan Swedia disini," beber Arief saat bersama Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan ke area peternakan dan perkebunan Bona-Munsö di Stockholm, Swedia, pekan ini.

Dijelaskannya, peningkatan kualitas *breeding* dengan indukan kualitas terbaik, dapat dilakukan dengan mendatangkan indukan yang berasal dari negara dengan iklim tropis menyerupai Indonesia.

"Ini agar indukan tidak sulit saat proses aklimatisasi," paparnya.

Kemudian *transfer of knowledge* dan teknologi dapat diwujudkan dengan kerja sama berskema *joint operation/joint venture*. Indonesia perlu merangkul berbagai perusahaan peternakan yang dinilai kapabel, Swedia salah satunya.

Swedia sebagai negara dengan sistem peternakan cukup mumpuni, Arief berharap dapat mendorong terbangunnya kerja sama Indonesia dengan Swedia. ■ **ers/E-10**

Title	ANCAMAN PASOKAN BERAS GLOBAL	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	17	
Author	Ni Luh Anggela & Wibi P. Pratama	



Petani menjemur gabah di tempat penggilingan padi di kawasan Gunung Bentang, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Pasar beras global sedang waswas karena persediaan yang terus berkurang akibat cuaca panas. Alarm pun menyala, harga beras melambung tinggi mendekati titik tertingginya dalam 15 tahun terakhir, bahkan diprediksi akan sulit turun.

Ni Luh Anggela & Wibi P. Pratama
redaksi@bisnis.com

Tahun lalu, India selaku pemasok komoditas beras terbesar memberlakukan pembatasan ekspor beras karena kekhawatiran cuaca panas atau cuaca yang lebih kering akibat El Nino akan menekan produksi.

Persediaan yang berkurang setelah itu menemui persoalan baru, yakni ancaman turunnya pasokan dari Asia Tenggara dan Brasil.

Hal itu menjadi perhatian serius karena beras menjadi makanan pokok bagi miliaran orang di Asia dan Afrika. Lonjakan harga beras dapat meningkatkan tekanan inflasi dan mengerek impor negara-negara pembeli.

Dilansir dari Bloomberg, harga beras putih Thailand—yang menjadi patokan di Asia—mengalami lonjakan US\$71 sejak April 2024 menjadi US\$649 per ton. Lonjakan itu semakin mendekati rekor harga tertinggi beras selama 15 tahun terakhir yang pecah pada Januari 2024.

Analisis pasar komoditas International Grains Council yang berbasis di London, Peter Clubb, menjelaskan bahwa cuaca menjadi pendorong utama

yang akan memengaruhi produksi beras dari Asia Tenggara. Risiko cuaca panas yang menyebabkan kekeringan, akibat El Nino, dikhawatirkan membuat harga beras sulit turun, juga produksi beras yang turun saat kemarau.

“Kita perlu memperhatikan cuaca, khususnya musim hujan di Thailand, Vietnam, dan India dalam beberapa bulan mendatang. Kunci dari hal ini kemungkinan besar adalah transisi dari El Nino ke La Nina,” ujar Clubb, dilansir dari Bloomberg pada Selasa (21/5).

Peter Clubb menilai kedatangan pasokan tanaman baru yang melambat di Asia Tenggara turut berpengaruh dalam kenaikan harga.

Hal itu terjadi ketika panen di luar musim terjadi di Thailand, lalu tanaman utama musim panen di Vitenam telah berakhir.

Pengaruhnya cukup besar karena Thailand merupakan eksportir beras kedua terbesar, dan Vietnam di posisi ketiga. Permintaan yang tinggi dari Indonesia, seiring naiknya impor dalam jumlah besar, sebenarnya turut membantu mendukung sentimen di pasar beras.

Laju impor beras Indonesia dan potensi perubahan pem-

batasan ekspor India, menurut Clubb, akan memengaruhi harga beras ke depannya.

Tekanan tidak hanya datang dari Asia Tenggara, tetapi juga dari negeri sepak bola, Brasil. Banjir parah yang melanda selatan Brasil, yakni negara bagian Rio Grande do Sul—wilayah yang menyumbang 70% produksi beras Brasil—turut andil menyebabkan harga beras melambung tinggi.

Analisis komoditas di unit BMI Fitch Solutions Charles Hart menilai bahwa banjir di selatan Brasil itu membawa kegelisahan bagi pasokan beras secara global.

Dampak banjir itu diperkirakan akan terlihat beberapa pekan ke depan. “Banjir ini terjadi bersamaan dengan panen padi di Brasil, yang sebagian belum selesai,” ujar Hart, dilansir dari Bloomberg. Dia menilai bahwa ada kekhawatiran yang cukup signifikan terhadap produksi dalam negeri dan ekspor beras Brasil.

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan pada pekan lalu bahwa hujan akan membantu panen padi di Rio Grande do Sul.

Implikasinya, negara tersebut kemungkinan harus mengim-

“**Kita perlu memperhatikan cuaca, khususnya musim hujan di Thailand, Vietnam, dan India dalam beberapa bulan mendatang.**”

por beras dan kacang-kacangan. Brasil adalah pengeksport beras terbesar kesembilan di dunia, menurut data Departemen Pertanian Amerika Serikat.

SULIT TURUN

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menilai bahwa harga cecaran tertinggi (HET) beras sulit kembali ke harga semula, meskipun pemerintah sudah beberapa kali melakukan relaksasi baik bagi beras premium maupun medium.

“Biasanya sulit ya kalau

sudah sekali naik susah turun, memang kondisinya begitu,” ujar Bayu di Sentra Penggilingan Padi Perum Bulog, Karawang, Jawa Barat pada Senin (20/5).

Menurutnya, harga beras bisa saja turun jika produksi beras tahun ini dalam kondisi melimpah. Namun, hal tersebut sulit terjadi dalam waktu dekat.

Bayu, yang merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), menyebut bahwa pada Juni 2024 defisit beras berpotensi menjadi sekitar 0,45 juta ton atau 450.000 ton.

“Bulan Juni saja sudah defisit lagi jadi saya duga akan sulit untuk turun,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya telah melakukan relaksasi HET untuk beras premium dan beras SPHP. Relaksasi HET beras premium kembali diperpanjang hingga 31 Mei 2024.

Adapun, kenaikan HET beras premium yang berlaku sejak 10 Maret 2024 adalah sebesar Rp1.000 per kilogram untuk tiap wilayah.

Misalnya untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan, HET dipatok menjadi Rp14.900 per kilogram dari sebelumnya Rp13.900 per kilogram. ■



Pekerja menggiling gabah kering di penggilingan tradisional di Klapanunggal, Bogor, Jawa Barat.



Petani memisahkan gabah dari batang padi saat panen di Desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Title	FIELD TRIP PESERTA WORLD WATER FORUM	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	18	
Author	Bisnis/Aprilio Akbar	

■ FIELD TRIP PESERTA WORLD WATER FORUM



Antara/Aprillio Akbar

Secretary General of the Ramsar Convention on Wetlands Musonda Mumba (*tengah*) memanggul padi saat kegiatan *field trip* rangkaian dari World Water Forum ke-10 2024 di Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih,

Tabanan, Bali, Kamis (23/5). Objek wisata yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 2012 itu menjadi salah satu lokasi kunjungan partisipan World Water Forum pada 23–25 Mei 2024.

Title	HARGA BERAS MENUJU TITIK BARU	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	5	
Author	Nuhansan Mikrefin YP & Ni Luh Anggela	

| KOMODITAS PANGAN |

HARGA BERAS MENUJU TITIK BARU

Harga beras premium dan beras medium di pasar bakal masuk ke titik ekuilibrium baru sejalan dengan rencana pemerintah menetapkan secara permanen harga eceran tertinggi kedua jenis beras tersebut.

Nuhansan Mikrefin YP & Ni Luh Anggela
redaksi@bisnis.com

Puncak musim panen padi yang bakal terjadi pada Mei–Juni tahun ini tidak mampu mengerek turun harga beras di pasar. Merujuk Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis (23/5), harga beras tetap naik dibandingkan dengan sehari sebelumnya.

Data itu mencatat harga beras jenis premium terkerek naik 0,65% menjadi Rp15.570 per kilogram (kg), sedangkan harga beras medium naik 0,30% menjadi Rp13.490 per kg.

Dengan kondisi itu, pemerintah mulai mempertimbangkan menetapkan secara permanen aturan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium dan beras medium pada bulan depan.

Direktur Stabilisasi Pasokan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menyatakan bahwa Bapanas tengah menggodok regulasi yang mengatur HET beras baru tersebut.

“Mudah-mudahan sebelum 31 [Mei] atau pas 31 [Mei] sudah terbit Perbadannya. Artinya menjadi permanen ya, berganti menjadi Peraturan Badan Pangan Nasional,” katanya kepada *Bisnis*.

HET beras baru pada bulan depan bakal sama dengan HET yang tercantum saat relaksasi diberlakukan.

Merujuk surat Kepala Bapanas Nomor 102/TS.02.02/K/3/2024 tanggal 9 Maret 2024, relaksasi HET beras premium ditetapkan menjadi Rp14.900 per kg—Rp15.800 per kg. Sebelumnya, HET beras premium dipatok Rp13.900 per kg—Rp14.800 per kg menurut wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan diberlakukan relaksasi HET beras premium menjadi Rp14.900 per kg atau naik Rp1.000 per kg dari HET sebelumnya di Rp13.900 per kg.

HET beras premium untuk wilayah Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, diberlakukan Rp15.400 per kg. Sebelumnya, HET beras premium untuk wilayah itu ditetapkan Rp14.400 per kg.

Selanjutnya, wilayah Bali dan Nusa Tenggara, relaksasi HET beras premium di Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya Rp14.400 per kg. HET itu juga berlaku sama di wilayah Nusa Tenggara Timur dengan relaksasi HET beras premium Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya Rp14.400 per kg.

Untuk wilayah Sulawesi, relaksasi HET beras premium menjadi Rp14.900 per kg dari HET sebelumnya Rp13.900 per kg. Untuk wilayah Kalimantan, relaksasi HET beras premium menjadi Rp15.400 per kg dari HET sebelumnya Rp14.400 per kg.

Khusus wilayah Maluku dan Papua, relaksasi HET beras premium menjadi Rp15.800 per kg daripada HET sebelumnya Rp14.800 per kg.

Hal yang sama juga berlaku Penugasan SPHP Beras tahun 2024. Dalam Surat Kepala Bapanas No. 142/TS/02.02/K/4/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penugasan SPHP Beras tahun 2024, HET beras SPHP naik menjadi Rp12.500 per kg—Rp13.500 per kg. Sebelumnya, HET ditetapkan sebesar Rp10.900 per kg—Rp11.800 per kg. Sama seperti beras premium, HET beras SPHP juga ditetapkan berdasarkan zona. (*Lihat infografik*)

Maino juga menyampaikan Kepala Bapanas siap menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang kini memasuki tahap harmonisasi.

Maino mengharapkan peraturan mengenai HPP gabah dan beras bisa segera diterbitkan paling lambat 31 Mei 2024, bersamaan dengan terbitnya Perbadan HET untuk beras premium dan medium.

HPP gabah dan beras yang berlaku pada 3 April hingga 30 Juni 2024, pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.000

per kg dari sebelumnya

Rp5.000 per kg. Untuk gabah kering giling (GKG) di gudang Perum Bulog ditetapkan menjadi Rp7.400 per kg dari sebelumnya Rp6.300 per kg.

Sementara itu, HPP beras di gudang Perum Bulog dengan derajat soboh minimal 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 20%, dan butir menir maksimal 2% yang sebelumnya Rp9.950 per kg dipatok menjadi Rp11.000 per kg.

Penyesuaian HPP gabah agar Perum Bulog menggenjot stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang berasal dari produksi dalam negeri sehingga tidak bergantung dari impor.

Pemerintah ternyata tidak saja fokus kepada impor dalam memenuhi CBP dan kebutuhan dalam negeri. Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga menajaki kerja sama teknologi pertanian dengan lembaga riset padi terbesar di Negeri Panda yaitu China National Rice Research Institute (CNRI).

Kerja sama tersebut mencakup peningkatan kualitas benih padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan.

Amran menjelaskan kerja sama yang didorong dengan CNRI adalah teknologi perta-

nian modern berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligent/ AI*) dan alat mesin pertanian modern seperti mesin pembibitan otomatis, *transplanter*, drone, *combine harvester*, dan *RMU (rice milling unit)*.

Menurutnya, tujuan kerja sama dengan China tersebut yaitu utamanya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Indonesia, dan peningkatan indeks pertanaman (IP) dengan perbaikan pola tanam.

Amran optimis kerja sama pertanian antara Indonesia dengan China bisa meningkatkan inovasi dan kerja sama petani.

“Kerja sama ini tidak hanya untuk menjamin kecukupan pangan di kedua negara, tapi juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pasokan pangan global,” ujar Amran.

FAKTOR PEMILU

Dalam kesempatan terpisah, pemerhati pertanian dari Center of Reform on Economic (Core) Eliza Mardian menilai tidak optimalnya pemerintah dalam mengendalikan harga beras seiring dengan rencana kenaikan HET beras premium dan medium.

Menurutnya, kenaikan harga beras pada akhir 2023 dan 2024 lebih pada faktor meningkatnya permintaan selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023, Pemilu, dan Lebaran 2024. Kenaikan harga

makin diperparah lantaran tata kelola yang semrawut dan belum dibenahi.

“Sebetulnya kalau dari sisi suplai itu stoknya aman. Kenaikan HET ini malah justru menandakan bahwa pemerintah tidak optimal mengendalikan harga,” kata Eliza.

Menurutnya, dampak dari kenaikan HET beras hanya dirasakan pedagang besar, bukan petani. Saat ini, harga beras masih relatif tinggi, tapi harga gabah di level petani anjlok dari rata-rata Rp7.000 per kg GKP menjadi Rp5.000 per kg—Rp5.500 per kg.

Dia berbanding dengan kenaikan HET juga sangat berbahaya jika pemerintah tidak mengerek harga pembelian gabah. Bila hal itu tak dilakukan, daya beli petani akan tergerus mengingat sebagian besar petani, terutama penggarap, hasil taninya tidak disimpan, tetapi sebagian besar dijual untuk modal menanam selanjutnya.

“Jadi ketika HET terus naik sementara harga gabah tidak juga dinaikkan, ini membuat petani terbebani saat mereka membeli beras tambahan dengan harga beras yang tinggi,” ujarnya.

Dia melihat urgensi menaikkan harga pembelian gabah lebih penting dibanding mengerek HET. Dengan begitu, Perum Bulog dapat optimal menyerap gabah dalam negeri dan melakukan operasi pasar ketika harga melambung. ■

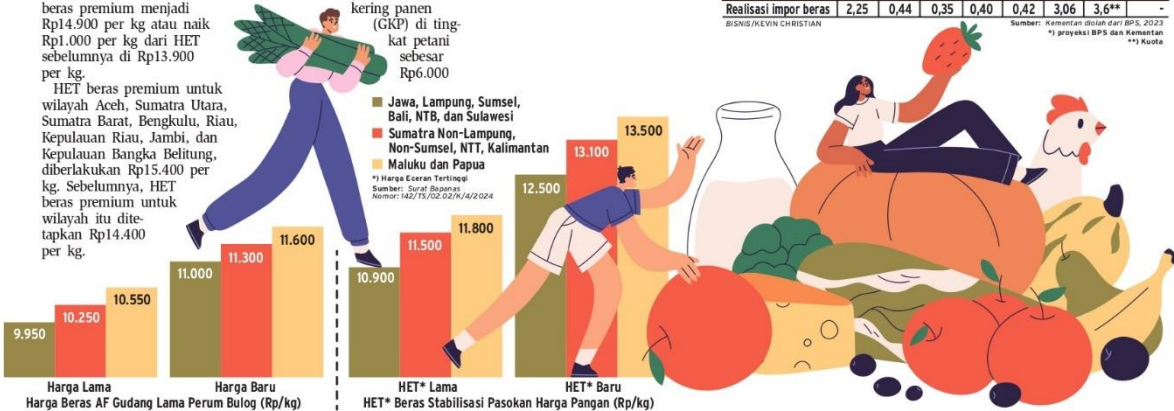
Badan Pangan Nasional telah menetapkan kenaikan harga Beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) di Indonesia per 1 Mei 2024. Ada peluang harga beras jenis lain ikut terkerek.

Produksi, Kebutuhan dan Realisasi Impor Beras 2018-2025 (juta ton)

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025**
Produksi beras	34	31	31	31	31	31,1	32	34
Kebutuhan beras	30	28	29	30	30	30	31	32
Realisasi impor beras	2,25	0,44	0,35	0,40	0,42	3,06	3,6**	-

BISNIS/KEVIN CHRISTIAN

Sumber: Kementerian dalam dari BPS, 2023
*) proyeksi BPS dan Kementerian
)*) Kuota



Dokumentasi

BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN

Title	UNGKIT POTENSI SAWIT & TEBU	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Bisnis Indonesia	
Page	6	
Author	Nugroho Nafika Kassa	

| TANAMAN PERKEBUNAN |

UNGKIT POTENSI SAWIT & TEBU

Tanaman perkebunan seperti sawit dan tebu dinilai memiliki potensi yang cukup besar untuk menggerakkan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Skema kemitraan antara *holding* perkebunan dan para petani dipandang bakal mendorong produktivitas kedua komoditas ini bagi produk domestik regional bruto.

Nugroho Nafika Kassa
redaksi@bisnis.com

Apalagi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bersama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) juga mulai serius menggarap pengembangan tanaman sawit dan tebu, utamanya melalui perluasan skema kemitraan dengan para petani.

Melihat potensi yang cukup menjanjikan, upaya tersebut akan didukung penuh oleh dua belah pihak dengan harapan bisa menjadikan komoditas itu masuk ke dalam komponen salah satu penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Sulsel.

Penjabat (Pj.) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, skema tersebut sebenarnya telah diterapkan untuk tanaman sawit sejak 2018.

Melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat, Pemprov Sulsel melakukannya di dua kabupaten, yaitu Luwu Timur dan Luwu Utara.

Berdasarkan data laporan *monitoring* progres Peremajaan Sawit Rakyat Provinsi Sulsel, di Kabupaten Luwu Timur tercatat total luas lahan 3.769,29 hektare (ha), dengan total luas tanam 3.295,89 ha. Sementara itu, di Kabupaten Luwu Utara tercatat ada total luas lahan 4.109,93 ha, dengan total luas tanam 3.870,44 ha.

Khusus untuk tanaman tebu, pihaknya masih akan melakukan evaluasi sistem manajemen airnya agar rendemen tebu di Sulsel yang bagus dan memiliki produksi yang tinggi.

Pasalnya, untuk produksi gula, rendemen tebu wilayah itu hanya berkisar 5%—7%, lebih rendah dibandingkan dengan kualitas tebu

di area Jawa yang rendemennya berkisar 8%—10%.

“Dua sektor yang oleh PTPN di Sulsel kami dukung penuh adalah sawit dan tebu. Tanaman sawit akan kami kembangkan terus seperti yang sudah dilakukan di Luwu, sedangkan tebu, mengingat saat ini impor gula konsumsi masih berlangsung, penanganan masalah rendemen tadi kami targetkan 2028 rampung,” jelasnya Rabu (22/5).

Direktur Manajemen Risiko PTPN III M. Arifin Firdaus menjelaskan, berdasarkan statistik Data Tetap 2022, total luas tanam sawit Sulsel 34.677 ha yang tersebar di 12 kabupaten.

Rinciannya, tanaman belum menghasilkan seluas 13.809 ha, tanaman menghasilkan 24.646 ha, dan tanaman rusak/tidak menghasilkan 1.732 ha.

Dari kondisi itu, imbuhnya, diperoleh produksi sebanyak 101.073 ton, dengan rata-rata 4.101 kilogram per ha.

Arifin mengatakan, tanaman tebu juga telah dibudidayakan di lima kabupaten di Sulsel, dengan total luas areal 3.212 ha dengan total luas panen 2.037 ha, dan produktivitas 1.816 kilogram per ha.

“Terkait dengan pengembangan tebu, di wilayah Sulsel, khususnya Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Bone, terdapat alokasi bantuan pupuk untuk lahan seluas 350 ha yang anggarannya bersumber dari APBN,” katanya.

SENTRA PASAR FISIK

Pada perkembangan lain, Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) membidik Provinsi Sumat-



Dua sektor yang oleh PTPN di Sulsel kami dukung penuh adalah sawit dan tebu.

ra Utara (Sumut) untuk menjadi pasar fisik minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO).

Hal itu tidak terlepas dari potensi yang dimiliki Sumut, yakni sebagai salah satu provinsi dengan lahan perkebunan sawit terluas di Indonesia.

Direktur ICDX Yugieandy T Saputra mengatakan bahwa Sumut memiliki potensi besar dalam pengembangan bursa komoditas yang telah diimplementasikan sejak Oktober 2023.

“Hal itu bisa dilihat dari jumlah pengusaha perkebunan kelapa sawit di wilayah ini, serta luasan wilayah perkebunan yang ada,” jelasnya belum lama ini.

Menurutnya, Sumut menjadi salah satu target potensial pasar fisik CPO.

Hal tersebut lantaran berdasarkan data Dinas Perkebunan dan Peternakan Sumatera Utara 2022, luas Perkebunan kelapa sawit di provinsi tersebut mencapai 1,37 juta ha.

Dari sisi pelaku usaha, tercatat setidaknya ada 327 perusahaan perkebunan kelapa sawit di provinsi tersebut pada 2022. *(KSB)*

Dokumentasi

**BIRO HUMAS DAN INFORMASI PUBLIK
KEMANTAN**

Tittle	Kunker Lagi, Jalan-jalan Lagi	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	1 Part 1	
Author	Budi Rahman Hakin, Ph.D	

CATATAN

Budi Rahman Hakim, Ph.D.

Kunker Lagi, Jalan-jalan Lagi

SETELAH sekian lama, publik mendengar kembali DPR melakukan kunjungan kerja (kunker). Sebagian anggota Komisi IV DPR baru saja melakukan kunker ke Swedia, yang katanya guna mempelajari praktik pertanian, peternakan, dan program makan siang gratis di sana.

Meski teknologi informasi semakin berkembang dengan akses terhadap pengetahuan semakin gampang, tidak dipungkiri kunjungan langsung masih sangat penting. Kunjungan itu untuk mengetahui detail dari sebuah program, sehingga dalam proses imitasi, peluang keberhasilannya cukup besar.

Jadi, kunker tersebut tidak salah. Kunker itu justru sangat bermanfaat, dengan catatan ilmu yang didapat dalam kunker betul-betul diserap, untuk kemudian diterapkan di Tanah Air. Sayangnya, selama ini, kunker yang dilakukan Dewan sering “mubazir”. Sebab, saat kunker, anggota Dewan lebih banyak jalan-jalannya ketimbang menyerap ilmu. Selain itu, lokasi kunker juga sering sangat berbeda dengan kondisi di Tanah Air.

Contohnya, pada 2017, Komisi II DPR melakukan kunker ke Jerman dan Meksiko untuk mempelajari sistem e-voting dalam Pemilu. Saat itu, Komisi II begitu ngotot untuk melakukan kunker

♦ BERSAMBUNG KE HAL 7

Title	Kunker Lagi, Jalan-jalan Lagi	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Rakyat Merdeka	
Page	1 Part 2	
Author	Budi Rahman Hakin, Ph.D	

Kunker Lagi, Jalan-jalan Lagi

... DARI HALAMAN 1

dengan alasan kunjungan langsung akan lebih baik dibanding hanya melakukan telekonferensi.

Nyatanya, hasil kunjungan itu tidak diterapkan di 2019. Bahkan, sampai 2024 pun, *e-voting* belum terlaksana. Sampai saat ini, Pemilu masih dilakukan secara manual. Jangankan *e-voting*, proses rekapitulasi juga masih manual.

Kita tidak ingin menuduh atau menyimpulkan hasil kunker yang dilakukan Komisi IV DPR ke Swedia tidak bermanfaat dan tidak bisa dilaksanakan di Tanah Air. Namun, ada dua alasan yang membuat ragu hasil kunker itu agak sulit diterapkan di sini.

Pertama, kunker tersebut dilakukan di akhir masa jabatan DPR periode

2019-2024. Pada 30 September nanti, masa jabatan mereka akan berakhir. Dengan waktu hanya tersisa tiga bulan, apa yang bisa mereka lakukan. Selama lima tahun saja tidak banyak yang mereka perbuat.

Sebagian dari mereka memang terpilih kembali menjadi anggota Dewan untuk periode 2024-2029. Namun, tidak ada jaminan mereka akan kembali duduk di Komisi IV. Sebab, penempatan anggota Dewan di alat kelengkapan DPR tergantung dari kebijakan dan “selera” pimpinan parpol dan fraksi.

Kedua, iklim di Swedia dan Indonesia sangat jauh berbeda. Swedia dingin. Sedangkan kita tropis. Jadi, pertanian dan peternakannya tentu sangat berbeda. Tumbuhan dan hewan ternak di sana belum tentu bisa berkembang dengan baik di Indonesia. ■

Title	Industri Rumput Laut Butuh Deregulasi	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Investor Daily	
Page	9	
Author	Tri Listiyarini	

Industri Rumput Laut Butuh Deregulasi

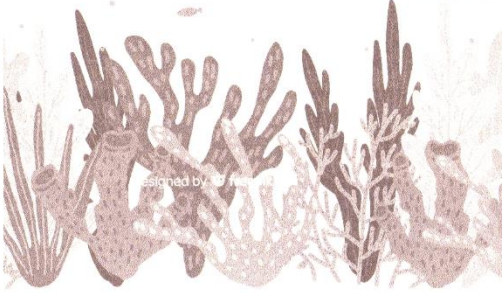
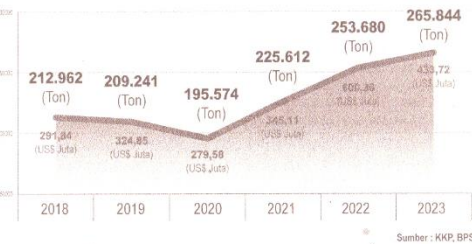
JAKARTA, ID—Industri hilir rumput laut nasional membutuhkan deregulasi kebijakan agar bisa memanfaatkan besarnya permintaan komoditas itu di pasar internasional. Deregulasi itu di antaranya dengan mengecualikan semua HS Code terkait rumput laut dan produk turunannya dari ketentuan devisa hasil ekspor (DHE). Merujuk riset Future Market Insights, nilai pasar rumput laut global 2023 mencapai US\$ 7,79 miliar dan akan menjadi US\$ 19,66 miliar pada 2033 atau memiliki tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) 9,7% sepanjang 2023-2033.

Oleh **Tri Listiyarini**

Menurut Ketua Asosiasi Industri Rumput Laut Indonesia (As-truli) Mc Donny W Nagasan, pasar global rumput laut terutama hidrokoloid sangat besar dan terus berkembang. Hal itu didorong berbagai faktor, termasuk naiknya permintaan makanan olahan serta penggunaan minyak dan gas. Contoh, CAGR 2018-2030 untuk karagenan 5,4% dan agar (agar-agar) 4,8%. Harga hidrokoloid komersial dari rumput laut juga termahal, karagenan bisa US\$ 11,27 per kilogram (kg) dan agar US\$ 21,04 per kg. Indonesia bisa memanfaatkan peluang itu dengan memacu ekspor. "Untuk keperluan itu, industri hilir rumput laut RI perlu didukung deregulasi agar daya saingnya kian baik," ujar Donny.

Donny memaparkan, terdapat tiga kebijakan di industri hilir rumput laut yang perlu deregulasi agar daya saing produknya makin baik. Pertama, mengecualikan seluruh HS Code terkait rumput laut dan produk turunannya dari PP No 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Dalam aturan tersebut, eksportir wajib menyimpan minimal 30% DHE dalam rekening khusus di dalam negeri selama tiga bulan. Kedua, mengubah nomenklatur Unit Pengolahan Ikan (UPI) menjadi Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL) agar sesuai dengan parameter audit pemeriksaan di tingkat budi daya, penyimpanan, pengolahan, dan persyaratan ekspor. Ketiga, sertifikasi kesehatan yang diwajibkan kepada eksportir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu dievaluasi seiring meleburnya lembaga-lembaga

Ekspor Rumput Laut Indonesia



karantina menjadi Badan Karantina Indonesia.

Donny menjelaskan hal itu saat Seminar on Accelerating the Upstream-Downstream Integration of the Seaweed Industry and Launching of the International Tropical Seaweed Research Center (ITSRC) yang digelar di Nusa Dua, Bali, pada 22 Mei 2024 dan dipantau dari kanal media sosial Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kamis (23/05/2024). Dalam kesempatan tersebut, Donny menuturkan, terdapat 50 lebih usaha pengolahan

di Indonesia yang siap menyerap rumput laut budi daya untuk industri hidrokoloid dan saat ini utilitasnya baru sekitar 50-60%. Artinya, peluang peningkatan usaha pengolahan rumput laut tersebut masih sangat terbuka apabila pemerintah mampu menyediakan ekosistem yang tepat bagi industri dan mengoptimalkan kapasitas terpasang.

Perkuat Riset

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan men-

gatakan, pengembangan rumput laut di Indonesia masih menemui sejumlah tantangan, antara lain sebagian rumput laut nasional hanya diekspor dalam bentuk mentah atau dijadikan karagenan dan agar-agar. Di sisi lain, diusahakan dalam skala kecil, produktivitas budi daya rendah akibat kurangnya penggunaan mekanisasi dan teknologi, serta adanya perubahan iklim dan penyakit. "Kunci mengatasi tantangan itu adalah riset dan teknologi. Indonesia memiliki banyak institusi yang melakukan penelitian rumput laut, seperti KKP, BRIN, perguruan tinggi, asosiasi, dan industri," ungkap Luhut saat membuka seminar.

Untuk itu, kolaborasi yang melibatkan pemangku kepentingan nasional dan global perlu diperkuat, termasuk melalui peluncuran ITSRC, dengan harapan Indonesia ke depan menjadi pemimpin global dalam industri rumput laut dan inovasinya. Menko Luhut juga menyatakan, pemerintah akan terus aktif mempromosikan pengembangan industri hilir rumput laut nasional. Sebab, produk turunan rumput laut memiliki potensi besar, termasuk untuk biostimulan, pupuk organik, produk pangan, bioplastik, dan dalam jangka panjang *biofuel*.

Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, berdasarkan Future Market Insights 2023, pasar rumput laut global mencapai US\$ 7,79 dan akan terus meningkat menjadi US\$ 19,66 miliar pada 2033. Proyeksi itu menghadirkan peluang usaha rumput laut cukup besar, di hulu maupun hilir. Sementara, Indonesia memiliki potensi lahan budi daya 12,1 juta hektare (ha) dan baru memanfaatkan 0,8%. Karenanya, demi mengoptimalkan peluang ekonomi rumput laut itu, perlu kolaborasi semua pihak. Hadirnya ITSRC di-

harapkan mampu menambah upaya penguatan ekosistem rumput laut di Indonesia. "Seluruh pemangku kepentingan, peneliti, dan investor perlu membangun kemitraan dan kolaborasi dalam penelitian, inovasi, dan integrasi hulu-hilir, dalam mendorong kemajuan pengembangan industri rumput laut di Indonesia," kata Trenggono.

Bangun Modeling

Dalam kesempatan itu, Menteri Trenggono mengungkapkan, KKP akan mengembangkan modeling budi daya rumput laut di Rote Ndao dan Maluku Tenggara tahun ini guna menggenjot industri hilir nasional. KKP sebelumnya telah membangun modeling rumput laut ramah lingkungan di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, seluas 50 ha. "Tahun ini, kami akan kembangkan pemodelan lagi di Rote Ndao dan Maluku Tenggara masing-masing 50 ha, target produksi di tiap lokasi 2.187 ton rumput laut basah per tahun," ujar dia dalam keterangan yang dikutip pada hari yang sama.

KKP juga menerapkan strategi revitalisasi untuk meningkatkan produksi dengan penyediaan bibit dan pembibitan kultur jaringan. Stabilitas dan kualitas produksi di hulu menjadi penopang tumbuhnya industri hilir rumput laut. Pada 2022, budi daya rumput laut Indonesia menghasilkan 9,23 juta ton yang didominasi varian *Cottonii* sebagai bahan karagenan, disusul *Sargassum*, *Gracilaria*, *Halimenea*, dan *Gelidium amanzii*. "Rumput laut berperan membentuk masa depan umat manusia dan memastikan keberlanjutan ekologi. Karena, rumput laut bisa sebagai sumber pangan alternatif, industri biofarmasi dan kosmetik, pengganti plastik yang ramah lingkungan, dan penangkapan karbon," jelas Trenggono.

Title	Pemerintah Minta Bulog Jadi Raja Rantai Pasok Pangan	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Investor Daily	
Page	9	
Author	TI	

Pemerintah Minta Bulog Jadi Raja Rantai Pasok Pangan

JAKARTA, ID—Kementerian BUMN mendorong Perum Bulog agar mampu mengembangkan kapabilitasnya melalui ambidextrous transformation dalam bisnis yang memiliki potensi besar di bidang *public service obligation* (PSO) dan komersial dengan berfokus pada proses digitalisasi, diversifikasi, dan hilirisasi produk. Dengan begitu, ke depan, Bulog mampu menjadi pemimpin rantai pasok (*supply chain*) pangan terpercaya di Indonesia yang memberikan pelayanan unggul, menjaga *availability*, *affordability*, dan *quality* demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, representasi visi Bulog harus bisa diciptakan dengan membangun jejaring dan kemitraan yang tepat guna memacu pertumbuhan perusahaan yang lebih tangguh dan lincah menghadapi tantangan. Hal itu dilakukan melalui kepercayaan (*trust*), kepemimpinan (*food supply chain leader*), pelayanan terbaik (*excellent services*), dan kesejahteraan masyarakat (*society welfare*). "Kami percaya, dengan semangat *delivering goodness*, Bulog akan terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat RI. Teruslah menjadi simbol kepercayaan dan kualitas dalam tiap butiran padi dan produk pangan yang disalurkan," ujar dia saat peluncuran logo baru Perum Bulog di Jakarta pada 22 Mei 2024.

Peluncuran resmi logo itu bertepatan dengan peringatan HUT Bulog ke-57 sebagai bagian dari proses transformasi BUMN pangan tersebut. Saat itu, hadir juga Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari serta Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dan para karyawan. Logo itu mengedepankan *rebranding* dan transformasi perusahaan demi meningkatkan kinerja perusahaan agar dapat berkontribusi lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

Bayu menjelaskan, peluncuran logo itu bagian transformasi perusahaan untuk menjadikan Bulog lebih modern dan kompetitif. Selain peluncuran logo, Bulog juga menginvestasikan sumber daya signifikan dalam digitalisasi teknologi serta penguatan dan pembangunan budaya perusahaan yang lebih kolaboratif dan inovatif. "Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan bisnis dengan karakter akselerasi perubahan yang cepat dan terus menerus menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan perusahaan. Untuk itu, transformasi ini jadi langkah penting untuk memastikan Bulog tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang dalam lingkungan bisnis yang kian kompetitif. Kami berkomitmen memberikan manfaat dan nilai lebih bagi masyarakat Indonesia," jelas Bayu.

Proses transformasi itu merupakan langkah strategis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan demi memastikan pertumbuhan Bulog secara berkelanjutan. **(tl)**

Title	Rantai Pasok Sawit Wilmar Sudah Terapkan NDPE	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Investor Daily	
Page	9	
Author	TI	

Rantai Pasok Sawit Wilmar Sudah Terapkan NDPE

JAKARTA, ID—Wilmar telah menerapkan Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (No Deforestation, No Peat, and No Exploitation/NDPE) kepada seluruh pemasok tandan buah segar (TBS) sawit yang berada di Lanskap Aceh Bagian Selatan. Langkah itu dilakukan Wilmar sebagai upaya untuk turut mendukung perlindungan Kawasan Konservasi Rawa Singkil yang menjadi bagian wilayah tersebut.

Menurut *Supplier and Engagement Lead* Wilmar Surya Purnama, pihaknya memastikan penerapan NDPE telah dilakukan oleh seluruh rantai pasok perusahaan, termasuk yang berada di Aceh Bagian Selatan. Sejumlah upaya yang sudah dilakukan, yaitu pendampingan dan peningkatan kapasitas perusahaan dalam penerapan NDPE dan kemamputelusuran (*traceability*), pendataan kebun petani, dan *engagement* dengan pemangku

kepentingan (*stakeholders*). “Lanskap Aceh Bagian Selatan memiliki banyak petani (sawit) swadaya. Dari hasil *assessment* yang kami lakukan sejak 2021, perlu adanya pendampingan terhadap para petani swadaya agar mereka dapat menerapkan Good Agriculture Practices (GAP),” ujar Surya dalam keterangan yang dikutip Kamis (23/05/2024).

Surya mengatakan, pihaknya telah melakukan pendekatan dengan pihak-pihak yang relevan dalam menerapkan NDPE di Lanskap Aceh Bagian Selatan, seperti pemasok TBS, institusi pemerintah, LSM lokal, pakar teknis, dan platform multipihak lainnya. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Wilmar adalah pelaksanaan lokakarya (*workshop*) pada 15 Mei 2024 di Subulussalam, Aceh. Lokakarya itu menjadi bagian untuk membangun dialog dan keterlibatan pemangku kepentingan di Lanskap Aceh Bagian Selatan.

Selain Wilmar, aktivitas tersebut juga digelar oleh Golden Agri Resources dan Musim Mas sebagai *stakeholders* yang juga memiliki rantai pasok di lanskap itu.

Hingga saat ini, Wilmar telah melakukan pendampingan petani sawit swadaya di beberapa provinsi, seperti Riau, Jambi, Sumatra Utara, dan Kalimantan Barat. “Melalui Program Petani Swadaya, kami terus bekerja sama dengan petani pemasok dalam menemukan langkah-langkah untuk meningkatkan praktik perkebunan yang sesuai Standar Keberlanjutan Global dan meningkatkan hasil produksi mereka,” jelas Surya.

Kepala Seksi Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Aceh Hadi Sofyan mengapresiasi kolaborasi perusahaan dalam membantu pemerintah mewujudkan proteksi Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa (SM) Rawa Singkil. **(tl)**

Title	GMO: Obat Mujarab Krisis Pertanian dan Pangan Global?
Date	24 Mei 2024
Media	Radar Cirebon
Page	2
Author	Aryo Seto Pandu Wiranto



GMO: Obat Mujarab Krisis Pertanian dan Pangan Global?

KRISIS iklim menimbulkan berbagai kerusakan dan bencana baik secara langsung maupun tidak langsung. Bencana yang dimaksud tidak hanya berupa angin ribut, banjir, tanah longsor dan bentuk-bentuk bencana fisik dan geografis saja, melainkan juga bencana kesehatan, sosial dan ekonomi seperti gagal panen, kelaparan, dan penyakit menular.

Jika ditelusuri secara seksama, kelaparan disebabkan oleh gagal panen, gagal panen terjadi akibat kekeringan, kemarau panjang dan perubahan cuaca yang semakin tidak dapat diprediksi, perubahan siklus musim diakibatkan oleh naiknya suhu rata-rata bumi yang berakibat dari meningkatnya emisi karbon dan gas rumah kaca. Bencana-bencana tersebut terjadi akibat reaksi berantai jika ditelusuri semuanya bersumber dari krisis iklim.

Dari sekian banyak bencana yang ditimbulkan dari krisis iklim, salah satu yang dampaknya sering tidak disadari karena tidak secara langsung terlihat adalah bencana gagal panen. Gagal panen disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekeringan dan kemarau panjang, serangan hama dan penyakit, atau curah hujan berlebihan yang secara bersamaan menimbulkan efek negatif yang dramatis pada hasil pertanian menimbulkan puso atau gagal panen total.

Salah satu penyebab bencana gagal panen adalah ledakan populasi serangga hama serta berkembangnya jenis-jenis patogen yang lebih resisten terhadap pestisida.

Meningkatnya suhu rata-rata bumi menciptakan kondisi optimal bagi serangga untuk berkembang biak secara cepat dan masif. Selain perubahan suhu rata-rata yang menimbulkan perubahan siklus hidup, perubahan suhu juga berpengaruh pada lingkungan habitat serangga hidup. Pergeseran habitat serangga hama akibat

pertanian penting yang meliputi padi, jagung, kedelai dan ubi (aneka kacang dan umbi) akibat serangan hama dan penyakit di Indonesia menurut Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian tahun 2024 adalah seluruh masing-masing 171.516 ha tanaman padi,

Oleh:
*Aryo Seto Pandu Wiranto**

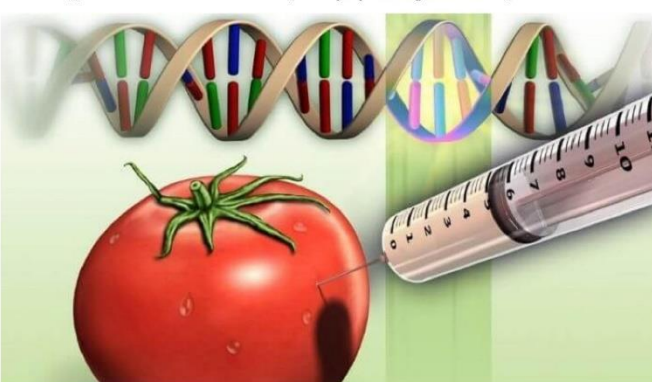
serta korporasi besar. Mencapai target net zero emission dan transisi hijau ini memerlukan waktu yang lama. Sehingga dibutuhkan upaya cepat dan efektif untuk mengatasi masalah serius yang sudah terjadi. Pengendalian hama dan penyakit dengan metode

menimbulkan pro dan kontra bahkan hingga hari ini, dari sudut pandang kelompok pro GMO, menyatakan bahwa GMO memiliki potensi yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah terkait krisis iklim dan berbagai aspek di bidang pangan dan pertanian. Mayoritas tanaman pangan pokok seperti jagung, padi, gandum dan kedelai sudah

pengujian keamanannya bagi konsumen dan terbukti melalui berbagai studi bahwa efek negatif dari konsumsi GMO tidak berbeda signifikan dengan produk tanaman non-GMO. Kebanyakan argumen yang menolak GMO muncul pada awal berkembangnya teknologi ini beberapa tahun lalu. Sampai artikel ini ditulis, perkembangan teknologi yang lebih mutakhir sudah sangat cukup untuk mengeliminasi dampak negatif dan kemungkinan-kemungkinan efek samping yang muncul dari teknologi GMO. Metode untuk memodifikasi gen organisme melalui teknologi CRISPR-Cas9 yang dapat mengubah komponen gen secara lebih akurat dan memungkinkan untuk melakukan modifikasi genetik tanpa melibatkan virus dari organisme lain - sebagaimana yang secara umum sudah dilakukan pada GMO terdahulu dan menimbulkan kecemasan terjadinya reaksi alergi atau timbulnya toksin akibat

"Tanaman Transgenik dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Pangan" yang ditayangkan beberapa waktu lalu melalui situs resminya mengemukakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai GMO masih sangat kurang dan karenanya teknologi ini perlu diperkenalkan. Dalam artikel tersebut juga disebutkan bahwa GMO adalah solusi yang tepat untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia beberapa tahun mendatang. Pertambahan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai angka 305 juta jiwa pada 2035 menjadi perhatian, karena dibutuhkan upaya efektif guna memenuhi kebutuhan pangan yang akan muncul dari pertumbuhan populasi ini. Berbagai regulasi perlu dibuat untuk menjamin keamanan penerapan teknologi ini dengan mengacu pada konvensi dan regulasi internasional yang sudah diterapkan di berbagai negara.

Menimbang potensi yang dimiliki oleh GMO maka kita sebagai masyarakat perlu memiliki pemikiran yang lebih terbuka. Kita sebagai masyarakat sekaligus konsumen berusaha lebih mengenal teknologi-teknologi yang memiliki potensi yang baik seperti GMO, namun tetap berhati-hati dengan melakukan pengawasan serta turut andil dalam mengkritisi praktik-praktik GMO yang dianggap tidak memenuhi standar keamanan konsumen dan lingkungan. Sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Uni Eropa yang secara ketat meregulasi pemanfaatan teknologi ini. Ilmuwan dan akademisi juga harus turut terlibat dalam memberikan informasi yang berdasarakan fakta dan data, menjamin kredibilitas informasi yang dibagikan kepada masyarakat. Karena pada akhirnya kita sebagai konsumen di masyarakatlah yang akan memanfaatkan hasil dari teknologi ini. (*)



tekanan perubahan iklim dapat menyebabkan invasi serangga hama ke wilayah yang baru dan lebih luas, menyebabkan kerusakan pada tanaman inang yang rentan di wilayah-wilayah baru tersebut. Menurut James I. nation (2022) Kehilangan produksi padi, jagung dan gandum diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu rata-rata bumi.

Menurut studi yang dilakukan oleh Singh dkk (2023) patogen akan menjadi lebih virulen dan dapat menimbulkan kerusakan yang lebih intensif karena peningkatan suhu rata-rata bumi.

Waktu inkubasi patogen juga semakin singkat sehingga mempercepat persebaran infeksi dalam suatu populasi tanaman. Pada suhu dan kelembapan yang relatif lebih tinggi, kemampuan pertahanan diri tanaman (sistem imun) dari penyakit juga menurun sehingga mempermudah terjadinya infeksi patogen. Peningkatan suhu juga memicu terganggunya keanekaragaman hayati dengan menurunnya populasi musuh alami serangga hama dan mikrobiom alami tanaman yang melindunginya dari hama dan penyakit, memperbesar peluang kerusakan dan gagal panen lebih jauh lagi.

Estimasi kerugian komoditas tanaman

44.872 ha tanaman jagung, 1.555 ha tanaman kedelai, dan 1.001 ha aneka tanaman kacang dan umbi.

Sebagian besar kerusakan tanaman pertanian ini disebabkan oleh hama berupa serangga dan arthropoda serta penyakit yang disebabkan virus, jamur dan bakteri.

Semua efek negatif dari perubahan iklim ini mendorong untuk dilakukannya tindakan preventif dan solutif, karena saat anda membaca artikel ini pun masalah-masalah tersebut sedang berlangsung dan akan memburuk jika tidak segera dilakukan penanganan yang tepat dan cepat.

Dalam upaya mitigasi jangka panjang seperti mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca penyebab pemanasan global, melakukan konservasi habitat alam, serta menjaga keanekaragaman hayati untuk menjaga keseimbangan ekosistem memerlukan usaha yang tidak kecil dan membutuhkan andil pemangku kebijakan

konvensional seperti penggunaan pestisida kimia sudah cukup lama dianggap sebagai solusi yang tidak ramah lingkungan dan memiliki efek buruk yang mencemari lingkungan.

Dari sekian banyak solusi yang ditawarkan dalam penanggulangan masalah hama dan penyakit tanaman pertanian yang berkelanjutan (sustainable), salah satu teknologi yang paling baru, terus berkembang dan sudah banyak dimanfaatkan di negara maju adalah teknologi organisme transgenik atau yang sering juga dikenal sebagai Genetically Modified Organism (GMO).

GMO menjadi salah satu teknologi yang termutakhir dan sangat membantu manusia untuk mengejar keteringgalannya dalam menyelesaikan masalah-masalah kronis yang hampir tidak tertolong lagi. Masalah kelaparan dan gagal panen, serta kebutuhan untuk memberi makan 8 milyar manusia di bumi. Teknologi rekayasa genetik untuk membuat GMO masih

dikembangkan dengan teknologi modifikasi genetik dengan menyisipkan gen yang mengkode sifat resisten hama dan resisten herbisida. pemanfaatan GMO ini sudah menunjukkan hasil yang sangat baik dan membantu dalam meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan suplai bahan makanan pokok dunia.

Pihak yang kontra mengemukakan bahwa terdapat efek negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dari produksi (pertanian) dan konsumsi produk GMO yang mungkin belum diketahui karena belum cukup studi yang mempelajari akan efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh GMO. Namun demikian dalam regulasinya, produk-produk hasil rekayasa genetik di negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Kanada telah melalui asesmen dan

Title	Memupus Bara di Kebun Tebu	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Lampung Pos	
Page	2	
Author	Asrul Septian Malik	

Memupus Bara di Kebun Tebu

Pergub telah menguntungkan penguasa korporasi perkebunan tebu di Lampung.

ASRUL SEPTIAN MALIK
asrul@lampungpost.co.id

MAHKAMAH Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1P/HUM/2024 mencabut Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola dan Peningkatan Produktivitas Panen Tebu sebagaimana telah diubah dengan Pergub Lampung Nomor 19 Tahun 2023. Pergub tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan yang baik dan tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Dalam putusannya, MA menyatakan pergub bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni undang-undang dan peraturan menteri yang secara jelas melarang pembukaan dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Profesor Hukum Administrasi Negara (HAN) FH Unila, Hieronymus Soerjatisnanta, menilai memanen tebu dengan cara dibakar hanya menguntungkan korporasi tertentu dan masyarakat hanya mendapat kesengsaraan. "Karena itu, Pemprov Lampung harus benar-benar mencabut Pergub tersebut," ujarnya, Kamis (23/5).

Bahkan, bisa saja perusahaan terindikasi sengaja membakar ketika panen tebu, namun berdalih terjadi kebakaran tanpa disengaja. Selain itu, bisa saja perusahaan mengklaim asuransi pertanian akibat dilih lahannya terbakar. "Di negara-negara maju dan negara lain, tidak ada yang panennya dengan cara membakar," katanya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, Irfan Tri Musri, pun menyebut lahirnya pergub yang telah berjalan lebih kurang 4 tahun tersebut telah menguntungkan penguasa korporasi perkebunan tebu di Lampung. Selain itu, pergub mengabaikan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

"Terbitnya peraturan gubernur tersebut merupakan karpet merah bagi korporasi untuk mengabaikan hak atas lingkungan hidup dan hak masyarakat oleh korporasi perkebunan tebu secara legal," katanya, kemarin.

Ia mengeklaim hal tersebut sangat merugikan masyarakat yang terganggu akibat asap yang muncul dari aktivitas pembakaran serta adanya debu yang masuk hingga permukiman masyarakat.

"Pemanenan dengan cara membakar ini juga tentunya akan menambah polusi dan sebaran emisi di Indonesia, khususnya di Lampung," ujarnya.

Berdasarkan hasil monitoring dan riset meja (*desk research*) Walhi Lampung di salah satu grup perusahaan perkebunan tebu, yaitu PT Sugar Group Company (SGC)—PT Sweet Indo Lampung, PT Indo Lampung Perkasa, dan PT Gula Putih Mataram—pada 2024 ini



PANEN TEBU. Petani tebu sedang mendemonstrasikan salah satu alat panen tebu di salah satu perkebunan tebu di Lampung, beberapa waktu yang lalu. Gubernur Lampung mencabut Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola dan Peningkatan Produktivitas Panen Tebu. Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengatakan hal tersebut meniadakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1P/HUM/2024 yang meminta Gubernur Lampung untuk mencabut Pergub tersebut.

memang belum ada fakta aktivitas pemanenan dengan cara membakar. Namun, berdasarkan analisis menggunakan data sebaran titik api/*hotspot* dari NASA, terdapat jumlah titik api di konsesi SGC pada 2021 dengan 57 titik api, kemudian 2022 ada 38 titik api, dan 2023 bertambah menjadi 135 titik api dengan tingkat kepercayaan yang beragam.

Awasai Perusahaan Tebu

Tren waktu sebaran titik api tersebut juga beragam, pada 2021 mulai April—Desember, kemudian 2022 dari April—September, dan 2023 terjadi pada Maret—November.

"Kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memonitor semua perusahaan perkebunan tebu di Lampung. Apabila masih terdapat aktivitas pemanenan dengan cara membakar, KLHK harus berani memberikan sanksi tegas, baik pidana dan/

atau perdata sesuai perundang-undangan," katanya.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani, mengungkapkan pihaknya akan menghitung total kerugian lingkungan hidup guna menyiapkan langkah hukum lanjutan. Kementerian LHK mengidentifikasi dan ada dugaan setidaknya panen 20 ribu hektare perkebunan tebu di Lampung dengan cara membakar sejak 2021 lalu.

"Pada 2021 kami temukan panen dengan membakar lahan tebu seluas 5.469,38 hektare. Kemudian di 2023 ada sekitar 14.492,64 hektare. Lokasinya ini kami cek hanya dua perusahaan, belum seluruhnya," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya juga telah menerima lima aduan masyarakat yang resah akibat cara pemanenan tebu melalui pembakaran ini.

Dia menyebut pergub tersebut telah menguntungkan perusahaan

secara finansial dengan mengorbankan lingkungan hidup, masyarakat dan merugikan negara, serta bertentangan dengan undang-undang.

Pascaputusan MA itu, KLHK sedang melakukan pembicaraan mengenai langkah lanjutan. Dia berkomitmen KLHK akan berupaya mengentaskan kerusakan lingkungan akibat aktivitas panen tebu dengan cara tersebut.

"Instrumen penegakannya saat ini sedang kami bicarakan, bisa saja menerapkan unsur pidana. Langkah hukum lebih lanjut agar tidak ada lagi kebijakan-kebijakan dan/atau tindakan seperti ini," katanya.

Pemerintah Provinsi Lampung mencabut Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola dan Peningkatan Produktivitas Panen Tebu. Hal tersebut meniadakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1P/HUM/2024 yang meminta gubernur Lampung mencabut Pergub tersebut. (CR1/CR3/R4)

Title	Program Pompanisasi Diperbanyak	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Radar Bandung	
Page	5 Part 1	
Author	Gun	



FOR RADAR SUMEDANG

DIPERBANYAK: Pompanisasi di Desa Marongge Kecamatan Tomo mengambil air dari Sungai Cilutung. Program Pompanisasi di Sumedang bakal diperbanyak 20 lokasi

Program Pompanisasi Diperbanyak

KOTA - Program pompanisasi untuk areal tanaman padi yang telah dicoba Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Sumedang di Desa Marongge Kecamatan Tomo, akan diperluas ke wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Sumedang.

Bahkan kini sudah ada 20 kelompok di 20 lokasi yang datanya telah masuk ke DPKP Sumedang untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi lapangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Sajidin mengatakan dari

20 kelompok yang datanya telah masuk luas lahannya mencapai 608 hektar. "20 lokasi ini tersebar di beberapa kecamatan yaitu Ujungjaya, Tomo, Situraja, Sumedang Selatan, Conggeang dan Buahdua," kata Sajidin, belum lama ini.

■ **PROGRAM**Baca Hal 9

Title	Program Pompanisasi Diperbanyak	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Radar Bandung	
Page	5 Part 2	
Author	Gun	

Program Pompanisasi Diperbanyak

■ *Sambungan dari Hal 5*

Dikatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi atas ajuan dari 20 titik lokasi tersebut, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai regulasi dari pusat. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi antara lain luas areal minimal 20 hektar dan berada dalam satu hamparan.

“Kemudian areal tanam merupakan sawah tadah hujan, ada sumber air yang bisa disedot oleh pompa untuk mengairi areal sawah, serta sumber air selalu tersedia dan tidak kering saat kemarau. Apabila persyaratan itu sudah dipenuhi maka lokasi tersebut

bisa diajukan ke pusat untuk mendapatkan program pompanisasi dan mendapatkan bantuan pompa ukuran besar,” ungkap Sajidin.

Hanya saja lanjut Sajidin, meski arealnya diperbanyak namun untuk operasional seperti solar ataupun bensin ditanggung oleh petani bersangkutan. “Pemerintah mungkin hanya membantu membuat rekomendasi agar petani diberi kemudahan dalam membelinya. Adanya program pompanisasi ini diharapkan ada peningkatan produksi padi karena dengan adanya program ini, areal tanam padi akan bertambah,” imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi Desa Marongge Kecamatan Tomo, Jumat 5 April 2024. Kedatangan Mentan Andi untuk mengecek program Pompanisasi dan Olah Tanah di Desa Marongge, yakni Poktan Gumilang seluas 25 hektar sawah, dan Poktan Tunas Harapan seluas 26,7 hektar. Pompanisasi di Desa Marongge airnya disedot langsung dari Sungai Cilutung.

Ia mengatakan satu Pompanisasi ini bisa mengairi sampai 100 hektar. Dirinya menjabarkan konsep pompanisasi yang ditargetkan akan mengairi 1.000.000 hektar lahan sawah di Indonesia. **(gun)**

Tittle	Setop Pembakaran Lahan Tebu	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Lampung Pos	
Page	2	
Author	Lampung Pos	

TAJUK

Setop Pembakaran Lahan Tebu

PEMBAKARAN lahan tebu tidak dibenarkan atas dasar apa pun. Sebab, kerusakan lingkungan yang paling terdampak dari tiap pembakaran lahan. Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 P/Hum/2024 Tanggal 19 Maret 2024 antara Nadia Ratu Anisa dkk dan gubernur Lampung telah menguatkan pembakaran lahan itu mesti dihentikan.

MA mengabulkan uji materiil kepada peraturan tersebut. Hal itu bertujuan menghentikan panen tebu dengan cara membakar karena dapat mencemari dan merusak lingkungan.

Gubernur Lampung akhirnya mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola dan Peningkatan Produktivitas Panen Tebu. Hal itu untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1P/HUM/2024.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat setidaknya ada dua perusahaan tebu di Lampung yang terindikasi melakukan pemanenan tebu dengan cara dibakar, yakni PT Sweet Indo Lampung (SIL) dan PT Indo Lampung Perkasa (ILP). Pada 2021, perhitungan awal luas lahan tebu yang dibakar PT SIL dan ILP mencapai 5.469 hektare. Sedangkan, luas lahan yang terbakar pada 2023 mencapai 14.492 hektare.

Peraturan tersebut telah menguntungkan perusahaan perkebunan tebu. Panen tebu dengan cara membakar memang menghemat biaya panen, akan tetapi tindakan ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar terkait dengan pelepasan emisi gas rumah kaca, kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta mengganggu kesehatan masyarakat akibat asap dan partikel debu.

Kebijakan gubernur Lampung yang mengizinkan panen tebu dengan cara membakar itu harus dicabut. Kebijakan ini telah menguntungkan perusahaan secara finansial, dengan mengorbankan lingkungan hidup, masyarakat, dan merugikan negara, serta bertentangan dengan undang-undang.

Oleh sebab itu, perlu menghitung total kerugian lingkungan hidup guna menyiapkan langkah hukum lebih lanjut. Langkah hukum lebih lanjut harus dilakukan agar tidak ada lagi kebijakan-kebijakan atau tindakan yang menguntungkan pihak tertentu secara finansial. Sebab, sejauh ini lingkungan hidup, masyarakat, dan negara, menjadi korban dan dirugikan.

Sebagai informasi, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Panen dan Produktivitas Tanaman Tebu sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2023 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dan peraturan menteri pertanian.

Publik mengapresiasi putusan MA yang menekankan keseimbangan lingkungan hidup. Permohonan uji materiil ini untuk ketertiban dan kepastian hukum serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan panen dengan cara bakar itu ilegal. Selain itu, diharapkan dapat menyelamatkan lingkungan hidup serta menjamin hak kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Lampung, serta komitmen Indonesia untuk perubahan iklim.

Dalih pembakaran lahan untuk menyuburkan tanah tidak sepenuhnya benar. Dalam waktu dekat tanah memang menjadi subur karena tingkat keasaman atau PH tanah meningkat. Apabila praktik pembakaran dilakukan dalam jangka panjang, justru menurunkan kualitas tanah dan merusak lingkungan. Banyak cara lain untuk panen, salah satunya menggunakan mekanik.

Praktik pemanenan tebu melalui pembakaran merupakan perbuatan ilegal karena melanggar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka, setop pembakaran lahan tebu sejak sekarang hingga seterusnya. Keselamatan lingkungan hidup di tengah krisis iklim global harus menjadi perhatian bersama. ■

Title	Siapkan SDM Industri Sawit Profesional ke Hilir	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Tribun Kaltim	
Page	3	
Author	Tribun Kaltim	



PELATIHAN - Pelatihan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Angkatan ke-II diikuti oleh 29 peserta yang berasal dari Kabupaten Paser. Kegiatan diadakan di Golden Tulip Balikpapan Hotel & Suites. Pelatihan ini berlangsung pada 23-28 Mei 2024.

Siapkan SDM Industri Sawit Profesional ke Hilir

● LPP Agro Nusantara Bersama BDPKS dan Ditjenbun Gelar Pelatihan ISPO

SOBIZ, TRIBUN - Data terbaru Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa luasan kebun kelapa sawit di Indonesia mengalami kenaikan. Di tahun 2023, Kementerian Pertanian menyatakan total luas perkebunan kelapa sawit naik menjadi 16,38 juta hektare.

Pemerintah sendiri menargetkan capaian produksi Crude Palm Oil (CPO) mencapai 100 juta pada tahun 2040. Hal ini tentu menjadi target yang harus dicapai oleh seluruh pelaku bisnis kelapa sawit di Indonesia, tidak terkecuali pekebun rakyat.

Untuk mendukung optimalisasi peran pekebun rakyat, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) mengadakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit.

Program yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian ini menyasar pekebun sawit di berbagai daerah penghasil kelapa sawit.

Berdasar Data Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perkebunan, pekebun sawit akan direkomendasikan mengikuti pelatihan yang telah disediakan. Salah satunya adalah Pelatihan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pelatihan merupakan pelatihan Angkatan ke II dan diikuti oleh 29 peserta yang berasal dari Kabupaten Paser. Diadakan di Golden Tulip Balikpapan Hotel & Suites. Pelatihan ini berlangsung pada 23-28 Mei 2024.

Para peserta akan mendapatkan materi berupa pembelajaran teori di kelas misalnya mengenai kebijakan P&K ISPO, manajemen kebun, peluang dan tantangan implementasi ISPO, prosedur sertifikasi ISPO pekebun dan lain sebagainya.

Peserta juga berkesempatan melaksanakan praktek di lapangan mengenai materi terkait di PT Alam Jaya Persada, KPN Group dengan didampingi oleh subject matter expert yang berpengalaman dan kompeten di bidang tersebut.

Untuk mencapai tujuan strategis bisnis kelapa sawit, pekebun sawit perlu mengelola kebun secara profesional, baik, terarah dan berprinsip keberlanjutan. Berfokus sebagai penggerak pe-

ngembangan industri khususnya bagi para pekebun swasta, BDP PKS ingin mendukung terciptanya praktik bisnis perkebunan kelapa sawit yang lebih kompetitif.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit didesain khusus untuk mengembangkan kemampuan dan kompetensi baik teknis dan non-teknis (manajerial) pekebun sawit.

Beragam jenis pelatihan dari berbagai aspek dalam bisnis kelapa sawit mulai dari teknis budidaya tanaman, manajemen keuangan, pengembangan kelembagaan dan usaha hingga praktek bisnis berkelanjutan ditawarkan kepada para pekebun sawit.

Usaha ini juga menjadi cara untuk membangun dan mempersiapkan SDM industri sawit profesional baik di hulu maupun hilir.

"Fokus utama pengembangan bagi pekebun sawit adalah pemanfaatan lahan untuk produktivitas maksimal. Itu mengapa pelatihan menyasar berbagai aspek, mulai dari pengetahuan, kemampuan praktik hingga peningkatan bisnis," tambah Pugar Indriawan, SEVP Operation LPP Agro Nusantara. Setiap tahunnya, kontribusi LPP Agro Nusantara pada program ini terus meningkat.

Tahun ini LPP Agro Nusantara dipercaya BDP PKS menyelenggarakan 43 judul pelatihan dengan 11 jenis pelatihan. Jumlah kelas ini meningkat sebanyak 35% dibanding jumlah kelas di penyelenggaraan tahun 2023. Secara total, LPP Agro Nusantara melatih sejumlah 1.339 peserta secara bertahap dalam periode April – September 2024. Jumlah peserta ini merupakan 21% dari total Data Rekomendasi Teknis.

Adapun wilayah pelaksanaan pelatihan ini diadakan di 7 provinsi yaitu: Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah yang terdiri dari 11 kabupaten. Dengan angka tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan BDP PKS yang semakin besar pada kemampuan LPP Agro Nusantara untuk menyelenggarakan program ini. (*)

Title	Durian Musang King Rp 40 Juta	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Kedaulatan Rakyat	
Page	11	
Author	Kedaulatan Rakyat	

Durian Musang King Rp 40 Juta

PEMBERITAAN di media massa belakangan ini banyak diwarnai dari liputan sidang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Banyak kesaksian mencengangkan terungkap dalam persidangan ini. Tidak mustahil, dalam proses persidangan berikutnya masih muncul hal-hal lain yang tidak terduga, bahkan bisa membuat kita geregetan.

Bagaimana tidak? Para saksi yang dihadirkan mengungkapkan berbagai ironi tindakan tak wajar di kementerian yang mestinya memakmurkan para petani. Misalnya pada sidang Senin (20/5), saksi Sekretaris Badan Karantina Kementan, Wisnu Haryana, mengaku pernah beberapa kali mengirim durian Musang King seharga Rp 20 juta hingga Rp 40 juta ke rumah dinas SYL, bahkan konon harganya sampai Rp 46 juta.

Tampaknya sang menteri dan koleganya suka pesta durian dan durian yang dipilih bukan sembarang durian, tetapi yang super mahal. Harga durian yang sekali pengiriman paling sedikit terdiri 6 kotak dan perkotak berisi lima sampai tujuh durian itu bukan harga yang murah, tetapi sangat fantastis. Ironi sekali, di saat para petani banyak kesulitan dan permasalahan, juga penghasilannya pas-pasan, Pak Menteri dan kroninya justru berpesta pora durian. Paling tidak pembelian durian ini sampai tujuh kali.

Bukan hanya durian-durian mahal yang dibeli dengan uang kantor, tetapi juga berbagai keperluan pribadi Pak Menteri, istri, anak, bahkan cucu dan kakaknya, juga dipenuhi dengan tidak merogoh kocek pribadi, meski pasti gajinya besar, jauh dari penghasilan para petani, melainkan dicari-carikan dari uang di Kementan. Dalam persidangan terungkap, pembiayaan pribadi tersebut antara lain untuk kakak SYL setiap bulan Rp 10 juta, umrah keluarga Rp 1.350.000.000, pendaftaran Bacaleg ke Partai Nasdem Rp 860.000.000, mobil Innova untuk anak SYL Rp 500.000.000, THR untuk 5 pimpinan Komisi IV DPR RI Rp

500.000.000, kado undangan Rp 381.000.000, maintenance apartemen Rp 300.000.000, tagihan kartu kredit Rp 215.000.000, beli lukisan Rp 200.000.000, sawer Biduan Rp 100.000.000, beli Dolar di bank Rp 64.000.000, perawatan anak SYL Rp 50.000.000, cicilan mobil Alphard Rp 43.000.000/bulan, uang jajan istri Rp 30.000.000, beli emas untuk, undangan Rp 7.000.000, parfum Rp 5.000.000 dan biaya makan minum di rumah dinas per hari Rp 3.000.000. Konon juga ada untuk membeli keris Rp 105 juta

Melihat angka-angka tersebut pasti banyak *gedheg-gedheg*, ternyata berbagai tindak korupsi tersebut selama ini dilakukan dengan tenang-tenang, di tengah-tengah semangat bangsa Indonesia memberantas korupsi. Pertanyaannya, kenapa semua itu bisa dilakukan dengan nyaman? Bagaimana pengawasannya selama ini? Termasuk bagaimana auditing keuangannya. Jangan-jangan semacam ini sudah bisa dilakukan sejak saat masih menjabat sebagai gubernur. Tentu saja ini tugas aparat terkait untuk menelusurinya. Mestinya kalau ada atasan semacam itu para bawahannya juga tidak perlu takut untuk tidak melayani, bahkan melaporkan kepada pihak berwajib.

Kita berharap, hal semacam itu tidak terjadi di kementerian atau lembaga negara lainnya. Bukan hanya pada pemerintahan saat ini, tetapi juga di masa-masa mendatang. Karena itu, di mana saat ini Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka sedang *milang-miling* calon menterinya, maka harus dicari figur yang bebas korupsi dan dipercaya tidak akan korupsi. Mestinya juga figur yang sederhana, tidak suka foya-foya, tidak suka mementingkan diri sendiri dan kroninya.

Kita membutuhkan pemimpin yang tahu penderitaan rakyatnya, bisa merasakan penderitaan rakyatnya, dan bersedia kerja keras agar rakyatnya tidak menderita. Untuk bisa mememilihnya tentu harus melihat *track record* atau rekam jejaknya jauh ke belakang. Kiranya masih ada waktu untuk itu. (*)

Title	Indonesia-Vietnam Kerja Sama Dibidang Teknologi Lahan Rawa	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Neraca	
Page	10	
Author	Gro	

Indonesia-Vietnam Kerja Sama Dibidang Teknologi Lahan Rawa

NERACA

Vietnam - Menteri Pertanian Republik Indonesia (RI) Andi Amran Sulaiman, memulai rangkaian kunjungan kerja resmi ke Negara Vietnam dan China. Amran langsung menuju tempat pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa, Republik Sosialis Vietnam (MARD) di Kota Hanoi dan disambut langsung oleh Menteri Pertanian dan Pembangunan Desa Vietnam, Le Minh Hoan beserta pejabat tinggi MARD lainnya.

Inti pertemuan kedua pemimpin Negara di sektor Pertanian ini adalah penguatan Kerjasama antara Indonesia dan Vietnam dalam pengembangan pertanian padi di lahan rawa, khususnya varietas bibit padi untuk lahan rawa dengan produktivitas yang tinggi serta teknologi mekanisasi dan pertanian presisi untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman padi di lahan rawa.

Disepakati juga untuk mengembangkan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan pertanian yang berkelanjutan atau sustainable agriculture.

Dalam pertemuan ter-

sebut, Amran menyampaikan perlunya penguatan kerja sama pertanian kedua negara antara Indonesia dan Vietnam melalui MoU bidang pertanian untuk menginisiasi pembentukan Kelompok Kerja Pertanian (Joint Agricultural Working Group).

Indonesia ingin mendorong Program Prioritas Pertanian untuk mengantisipasi krisis global yang terjadi saat ini dan mengatasi kemungkinan terjadinya kekeringan/basah ekstrem (banjir) di berbagai wilayah.

Pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan cepat dan konkrit dalam jangka pendek untuk meningkatkan index tanam dari produksi beras nasional melalui Perluasan areal tanam melalui program Optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi sekali dalam setahun, sistem tanam terpadu pada lahan sawah dataran rendah (padi gogo) di areal perkebunan dan Peningkatan Indeks Tanam melalui optimalisasi lahan rawa untuk penanaman padi 2-3 kali dalam setahun.

Terkait dengan program prioritas Indonesia tersebut, Amran berharap

Kerjasama yang kuat dengan pemerintah Vietnam untuk mendorong pengembangan mesin pertanian modern, Memperkuat sistem pengelolaan irigasi pertanian, Digitalisasi dan mesin pertanian yang presisi serta fasilitasi Akses Pasar.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pertanian dan Pembangunan Desa Vietnam, Le Minh Hoan juga menyampaikan permohonan untuk memperoleh pasokan buah-buahan dari Indonesia khususnya buah Salak Bali, yang sangat digemari Masyarakat Vietnam dan prospek pasarnya masih sangat tinggi.

Saat ini harga salak bali dari Indonesia di Vietnam di jual seharga 250 ribu Dong Vietnam per Kg atau setara 157 ribu rupiah perkilo nya.

Sebagaimana diketahui pada tahun 2023, total nilai perdagangan komoditas pertanian antara Indonesia dan Vietnam mencapai USD 1.93 miliar.

Indonesia memperoleh banyak keuntungan dari ekspor produk perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao, dan nilam); produk hortikultura (khususnya buah-buahan tropis), dan sarang burung/SBW.  gro

Title	Kerja Sama Perikanan Budi Daya di Kawasan ASEAN dan Kepulauan Pasifik Diperkuat	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Neraca	
Page	11	
Author	Agus/gro	

Kerja Sama Perikanan Budi Daya di Kawasan ASEAN dan Kepulauan Pasifik Diperkuat

NERACA

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak negara sahabat di wilayah ASEAN dan Asia Pasifik untuk bekerja sama dalam sektor budi daya kelautan dan perikanan.

Sekretaris Jenderal KKP, Komjen Pol Prof. Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengungkapkan bahwa pembangunan sektor budi daya memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang bersumber dari protein ikan.

Selain itu, ASEAN dan kawasan Pasifik memiliki peran strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan yang berasal dari sumber daya hayati laut. Di sisi lain, aktivitas perikanan tangkap menyebabkan penurunan stok ikan secara global.

"Aktivitas manusia dan faktor lingkungan sangat mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus mengutamakan ekologi sebagai panglima untuk kemampuan re-

generasi sumber daya di masa depan" ujar Rudy dalam Workshop ASEAN-Australia Indo-Pacific on the Use of Technology for Sustainable Aquaculture.

Untuk itu, lanjut Rudy, salah satu opsi yang dapat ditawarkan adalah memanfaatkan perikanan budi daya sebagai sumber protein melalui penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

"KKP memiliki 5 program Ekonomi Biru, salah satunya Pengembangan Budi Daya Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan. Kami mengajak Negara sahabat di Kawasan untuk bersama menjadi bagian dari global *supply chain* ketahanan pangan bersumber dari perikanan," terang Rudy.

Forum pertemuan ASEAN dan Asia Pasifik ini merupakan salah satu bentuk peran aktif Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kerja sama yang inklusif dan konkret di Indo-Pasifik.

"Saya berharap kerja sama antara ASEAN dan Australia dapat terus berkembang khususnya di bidang perikanan budi daya,

termasuk dengan melibatkan negara-negara sahabat di lima wilayah Pasifik dan Samudera Hindia," tambah Rudy.

Lebih lanjut terkait dengan kerja sama perikanan di ASEAN, Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Vietnam Votilde; Vãfn Thã°á»Ýng, Menteri Sakti Wahyu Trenggono bertukar dokumen kerja sama perikanan dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Mr. Le Minh Hoan di Istana Kepresidenan Vietnam di Kota Hanoi.

"Insya Allah dengan sinergi dua negara tetangga yang punya semangat maju bersama, bisa mendorong majunya sektor perikanan di masing-masing negara," ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

"Trenggono menerangkan, lingkup kerja sama mencakup banyak lini dari sektor hulu hingga hilir. Di antaranya pembangunan perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, penjaminan kualitas dan keamanan produk perikanan, investasi, hingga pengola-

han, promosi, dan perdagangan produk perikanan.

Kerja sama dengan Vietnam termasuk pada perlawanan terhadap praktik ilegal, unreported, unregulated fishing, pertukaran informasi data perikanan, transfer teknologi dan pertukaran ahli, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Salah satu poin dalam kerja sama ini menyangkut pengembangan budidaya lobster di Indonesia," beber Trenggono.

Trenggono optimis jalinan kerja sama akan memperkuat produktivitas perikanan di masing-masing negara. Kerja sama ini sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dan Vietnam memerangi praktik perikanan ilegal yang berdampak buruk pada kelestarian ekologi dan perekonomian negara. "Saya meyakini Indonesia dimasa depan mampu menjadi bagian penting dalam rantai pasok produk lobster dunia. Kerja sama ini pun sangat potensial menjadikan dua negara sebagai juara sektor perikanan di kawasan," ungkap Trenggono. • agus/gro

Title	Peternak Hewan Kurban Harus Kantongi SKKH	 Kementerian Pertanian
Date	24 Mei 2024	
Media	Radar Tasikmalaya	
Page	6	
Author		

Peternak Hewan Kurban Harus Kantongi SKKH

PANGANDARAN, RADSIIK - Menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran meminta peternak hewan kurban agar memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Deni Rakhmat mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan imbauan kepada para peternak agar memperhatikan kondisi hewan dari para penjual. "Ini sangat penting, apalagi peternak hewan sapi untuk keperluan kurban," ungkapnya kepada *Radar*, Kamis (23/5/2024).

Menurutnya, sapi-sapi kurban yang ada di Kabupaten Pangandaran kebanyakan berasal dari wilayah Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. "Kalau hasil cek kami ke peternak yang biasa jual untuk kebutuhan kurban memang dari Jawa Tengah," katanya.

Ia mengatakan tim dari dinas sudah memantau ke beberapa peternakan sapi di daerah Kecamatan Mangunjaya, disana ada 30 ekor yang berasal dari Jawa Tengah. "Namun setelah kami cek dalam kondisi sehat semua," ungkapnya.

Ia mengatakan pengecekan itu baru dari satu wilayah, masih ada beberapa daerah yang akan dicek kondisi hewan

kurbannya. "Kami masih akan cek kondisi hewan ke beberapa penjual hewan kurban, bertahap," katanya.

Selain itu, kata Deni, pihaknya masih mengkhawatirkan ada pembelian hewan kurban dari luar daerah yang terindikasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). "Karena banyak bandar yang kucing-kucingan ada hewan kurban yang tidak mempunyai SKKH," terangnya.

Kemudian, menurut dia, banyak peternak yang masih menjual sapi betina untuk hewan kurban. Padahal secara ketentuan dari Kementan tidak diperbolehkan. "Karena itu untuk kelanjutan perkembangbiakan. Hanya

sekarang, karena keterbatasan jumlah sapi-sapi jantan dan peminat di peserta kurban lebih banyak ke sapi-sapi betina," ucapnya.

Sementara itu, saat ini tidak ada check point untuk di perbatasan karena kewenangan itu berada di pemerintah provinsi. "Untuk di perbatasan tidak ada pengecekan terutama dari Jawa Tengah ke Pangandaran, karena kewenangannya lalu lintas itu, kewenangan Pemprov," jelasnya.

Pihaknya mengimbau untuk warga yang akan kurban, terutama kepada DKM, untuk

melihat kondisi hewan kurban dengan teliti. "Alangkah baiknya ternak yang dibeli baik sapi atau kambing terantau kondisi kesehatannya," ucapnya. **(den)**